

BAB I

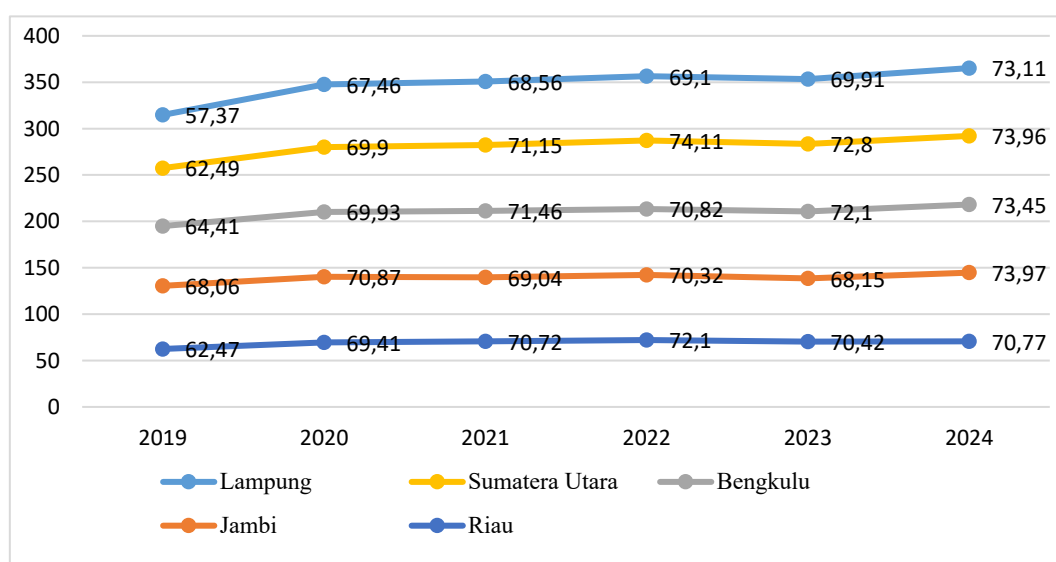
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan menjadi isu global utama yang dihadapi hampir seluruh negara. Aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk memberikan tekanan besar terhadap keberlanjutan lingkungan melalui eksploitasi sumber daya dan peningkatan limbah (Perwithosuci et al., 2025). Berdasarkan laporan *United Nations Environment Programme (UNEP, 2023)*, dunia saat ini menghadapi krisis lingkungan yang dikenal dengan *Triple Planetary Crisis* yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah. Indonesia juga mengalami permasalahan lingkungan yang cukup besar seperti meningkatnya deforestasi akibat alih fungsi lahan dan kegiatan pertambangan. Beberapa provinsi di Pulau Sumatera mengalami banjir dan longsor akibat kerusakan hutan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air hujan (Yahya, 2025).

Indonesia menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator untuk menilai kondisi lingkungan suatu wilayah. Secara umum Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Indonesia bervariasi antar pulau. Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Papua memiliki nilai IKLH di atas nilai IKLH nasional sedangkan Pulau Jawa dan Sumatera memiliki nilai IKLH di bawah IKLH nasional. Pulau Sumatera, meskipun memiliki peran ekonomi penting melalui sektor perkebunan, pertambangan, dan industri, beberapa provinsi masih mencatat IKLH di bawah nasional (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya dilema antara pertumbuhan

ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Berikut ini Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada 5 provinsi yang menunjukkan nilai IKLH di bawah nilai IKLH nasional di Pulau Sumatera:



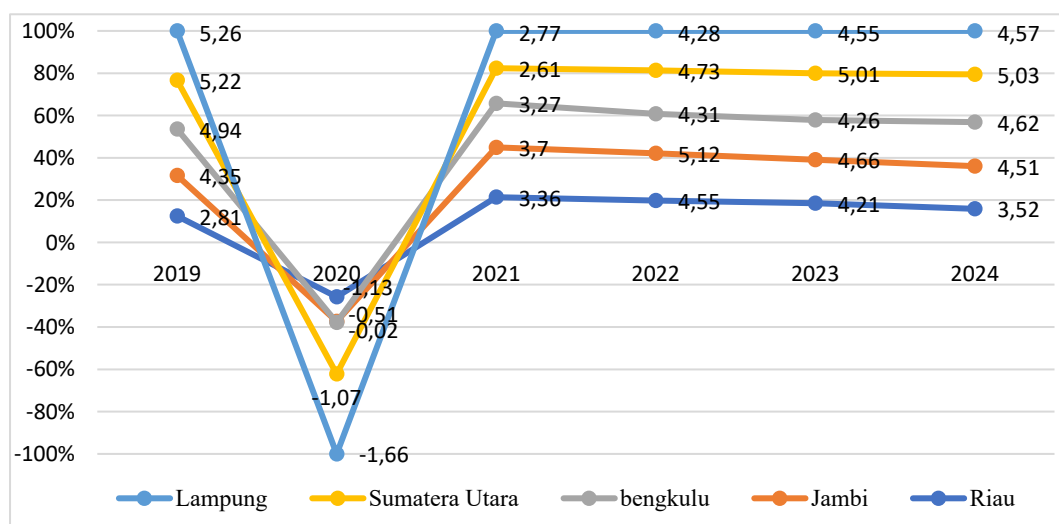
Gambar 1. 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada 5 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2024 (Poin)

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2024)

Gambar 1.1 menunjukkan kelima provinsi mengalami tren peningkatan kualitas lingkungan, meskipun terdapat fluktuasi antar tahun dan daerah. Pada tahun 2019, Jambi mencatat nilai IKLH tertinggi 68,06 poin, sedangkan Lampung terendah dengan 57,37 poin. Tahun 2020, kelima provinsi mengalami peningkatan signifikan sedangkan tahun 2021–2022 perbaikan kualitas lingkungan berlanjut pada sebagian besar provinsi, tetapi Jambi mengalami penurunan hingga tahun 2023 akibat banjir dan kebakaran hutan. Tahun 2024, Jambi mengalami peningkatan dan mencatat nilai tertinggi (73,97 poin) sementara Riau terendah (70,77 poin). Meski terjadi peningkatan, nilai IKLH kelima provinsi tersebut tetap masih berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya

pengelolaan lingkungan di Sumatera belum optimal dan memerlukan intervensi kebijakan yang lebih efektif.

Berbagai faktor diduga memengaruhi rendahnya IKLH di Sumatera antara lain pertumbuhan ekonomi yang tinggi kerap mendorong perluasan lahan industri dan perkebunan berdampak pada deforestasi serta degradasi lingkungan. Teori Kuznets pada *Environmental Kuznets Curve* (EKC) menunjukkan adanya hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi dengan degradasi lingkungan (Panayotou dalam Wafiq & Suryanto, 2021). Penelitian Yuda & Idris (2022) menemukan hubungan positif dan pengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap kualitas lingkungan hidup sedangkan penelitian Pertiwi et al., (2021) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Berikut ini grafik laju pertumbuhan ekonomi pada 5 provinsi di Pulau Sumatera dengan IKLH terendah di bawah nasional:

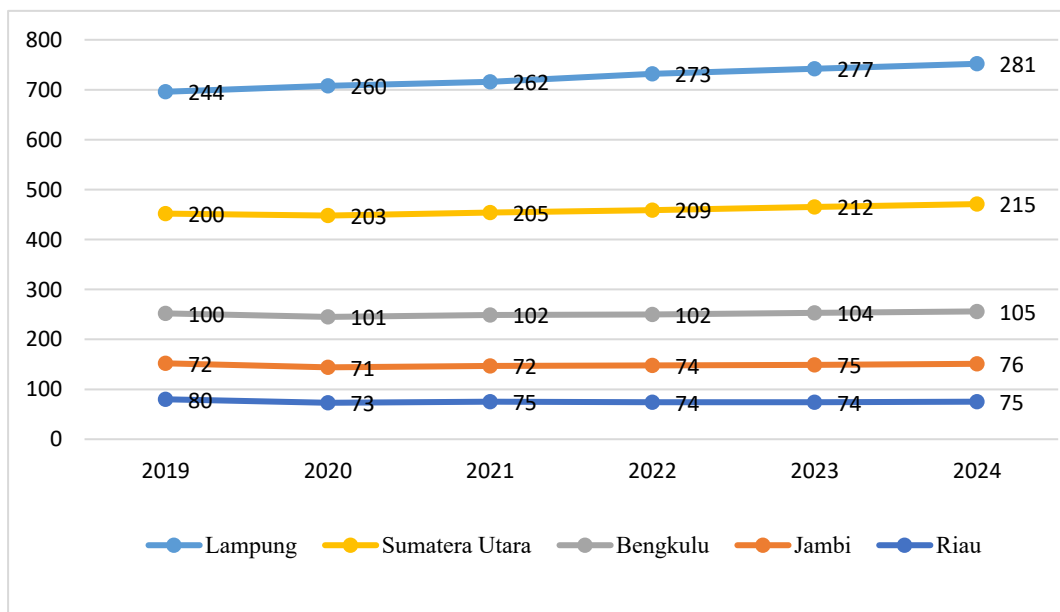


Gambar 1. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi pada 5 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2024 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Berdasarkan gambar 1.2 laju pertumbuhan ekonomi kelima Provinsi mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2024. Pada tahun 2020, ke-5 provinsi mengalami penurunan ekonomi yang signifikan disebabkan oleh pandemi COVID-19. Provinsi Riau mencatat pertumbuhan ekonomi terendah yaitu (-1,66%), diikuti oleh Sumatera Utara (-1,07%), Jambi (-0,92%), Bengkulu (-0,82%), dan Lampung (-0,81%). Kondisi ini disebabkan oleh perlambatan aktivitas ekonomi, terganggunya rantai pasok, serta pembatasan mobilitas yang berdampak pada sektor industri, perdagangan, dan jasa. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi pada lima provinsi mengalami peningkatan dan stabilisasi. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi setelah pandemi.

Selain pertumbuhan ekonomi, faktor aktivitas sosial seperti kepadatan penduduk dan jumlah kendaraan bermotor juga berperan penting. Kepadatan penduduk meningkatkan permintaan sumber daya alam dan energi, serta menghasilkan lebih banyak limbah (Todaro & Smith dalam Ilham 2021). Meningkatnya kepadatan penduduk menyebabkan tingginya kebutuhan lahan untuk industri, perumahan serta transportasi sehingga semakin memperburuk kualitas lingkungan. Penelitian Wafiq & Suryanto (2021) menemukan kepadatan penduduk berpengaruh negatif terhadap IKLH, sedangkan Yani et al. (2023) menunjukkan pengaruh positif. Berikut ini grafik kepadatan penduduk pada 5 provinsi di Pulau Sumatera dengan IKLH terendah di bawah nasional:



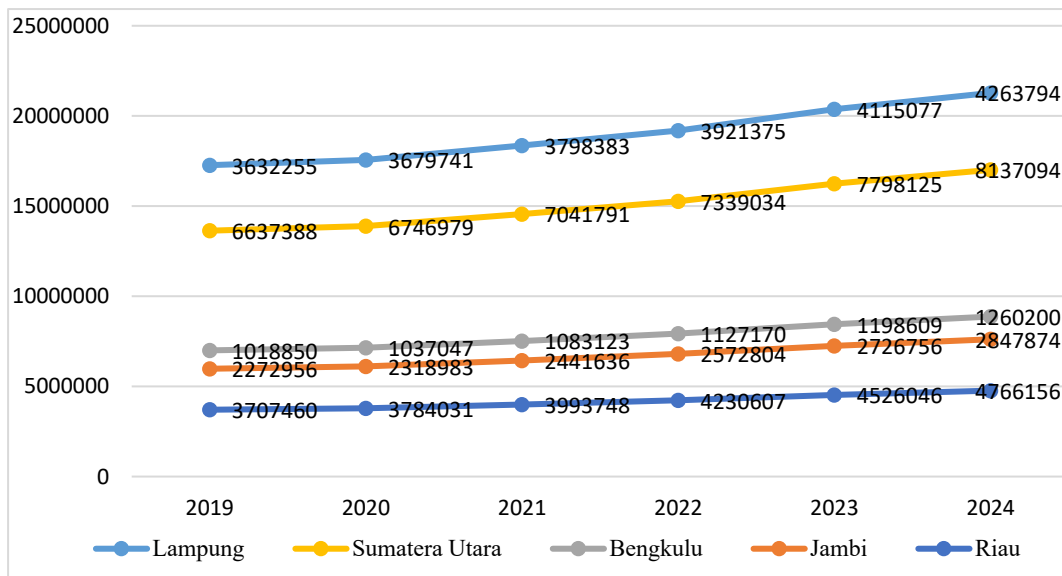
Gambar 1.3 Kepadatan Penduduk pada 5 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2024 (Jiwa/KM²)

Sumber: *Badan Pusat Statistik (2025)*

Berdasarkan gambar 1.3 kepadatan penduduk kelima provinsi menunjukkan tren yang bervariasi dari tahun 2019-2024. Secara umum, sebagian besar provinsi mengalami peningkatan kepadatan penduduk dari tahun ke tahun, walaupun terdapat beberapa fluktuasi di provinsi tertentu. Pada tahun 2019, Lampung adalah provinsi yang memiliki kepadatan paling tinggi yaitu 244 jiwa/km². Kepadatan penduduk Provinsi Lampung konsisten naik setiap tahunnya serta menjadi provinsi terpadat di antara provinsi lainnya. Riau dan Jambi mengalami penurunan menjadi 73 jiwa/km² dan 71 jiwa/km² pada tahun 2020. Penurunan ini dapat terjadi disebabkan perpindahan penduduk ke luar daerah.

Aktivitas sosial lainnya adalah transportasi darat atau jumlah kendaraan bermotor juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan. Teori eksternalitas menunjukkan adanya transportasi menyebabkan dampak negatif pada lingkungan seperti polusi udara, kemacetan lalu lintas dan kelangkaan

sumber daya (Sari, 2024). Pada lima provinsi dengan IKLH terendah di Pulau Sumatera jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan setiap tahun. Berikut ini grafik jumlah kendaraan bermotor pada 5 provinsi di Pulau Sumatera dengan IKLH terendah di bawah nasional:



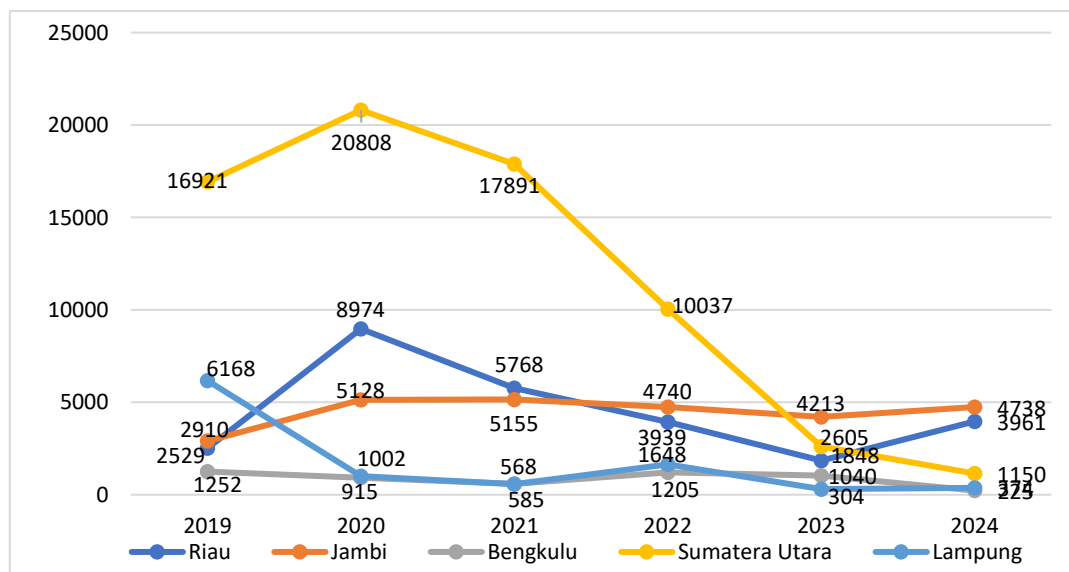
Gambar 1. 4 Jumlah Kendaraan Bermotor pada 5 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2024 (Unit)

Sumber: *Badan Pusat Statistik (2025)*

Gambar 1.4 menunjukkan pada tahun 2019 sampai 2024, Sumatera Utara konsisten mencatat jumlah kendaraan bermotor tertinggi diantara provinsi lainnya. Bengkulu menjadi provinsi dengan jumlah kendaraan bermotor terendah yaitu sebesar 1,2 juta unit. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan transportasi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian Ilham (2021), jumlah kendaraan bermotor memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas lingkungan. Namun demikian, penelitian Kondolele et al., (2023) menemukan bahwa jumlah kendaraan bermotor memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas lingkungan. Hal ini tentu

bertentangan dengan teori eksternalitas dan juga penelitian sebelumnya yang masih perlu untuk dikaji lebih lanjut..

Untuk mengatasi permasalahan lingkungan, peran pemerintah melalui belanja lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 pasal 45 ayat 1 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki potensi besar dalam pengendalian kerusakan lingkungan. Peran pemerintah dalam menangani permasalahan lingkungan hidup dapat dilihat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berikut ini grafik belanja lingkungan hidup pada lima provinsi di Pulau Sumatera:



Gambar 1. 5 Belanja Lingkungan Hidup pada 5 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2024 (Miliar/Rupiah)

Sumber: Pemerintah Daerah (2025)

Gambar 1.5 memperlihatkan belanja lingkungan hidup kelima provinsi di Pulau Sumatera berfluktuasi. Pada tahun 2019, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan anggaran terbesar yaitu sekitar 16,91 miliar rupiah. Pada tahun 2024, hampir semua provinsi mengalami penurunan. Hal ini dapat terjadi karena

pemerintah daerah lebih memprioritaskan sektor lain yang dianggap penting, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan ketahanan pangan. Di tahun 2024, Provinsi Jambi menjadi provinsi dengan anggaran terbesar diikuti Riau, Sumatera Utara, Lampung, dan Bengkulu.

Penelitian Oktavilia et al., (2021) menemukan belanja pemerintah memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup. Namun demikian, penelitian Yuda & Idris, (2022) menemukan belanja pemerintah memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang inkonsisten. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik mengenai permasalahan lingkungan khususnya pada kelima provinsi di Pulau Sumatera.

Berdasarkan data dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan kualitas lingkungan hidup di Sumatera pengaruhnya tidak terbatas pada dinamika pertumbuhan ekonomi, melainkan juga aktivitas sosial dan kebijakan pemerintah yang berjalan simultan. Oleh sebab itu penelitian ini penting untuk menguji kembali **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aktivitas Sosial, dan Peran Pemerintah terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** khususnya di provinsi-provinsi Sumatera yang masih memiliki nilai di bawah rata-rata nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat basis kebijakan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayah yang strategis namun rentan terhadap tekanan ekologis.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan latar belakang di atas, permasalahan pada penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada 5 Provinsi di Pulau Sumatera?
2. Bagaimana pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada 5 Provinsi di Pulau Sumatera?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada 5 Provinsi di Pulau Sumatera?
4. Bagaimana pengaruh Belanja Lingkungan Hidup terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada 5 Provinsi di Pulau Sumatera?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, tujuan dari penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada 5 Provinsi di Pulau Sumatera.
2. Mengetahui pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada 5 Provinsi di Pulau Sumatera.
3. Mengetahui pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada 5 Provinsi di Pulau Sumatera.
4. Mengetahui pengaruh Belanja Lingkungan Hidup terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada 5 Provinsi di Pulau Sumatera.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis serta manfaat praktis di antaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini memperkuat teori Environmental Kuznets Curve yang menguraikan hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kualitas lingkungan yakni meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan turunnya kualitas lingkungan.
2. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman terhadap teori Neo Malthusian dan teori Eksternalitas dengan mengkaji bagaimana pengaruh kepadatan penduduk serta jumlah kendaraan bermotor terhadap kualitas lingkungan hidup.
3. Penelitian ini mendukung teori mikroekonomi dengan menunjukkan bahwa belanja lingkungan hidup merupakan bentuk campur tangan pemerintah untuk menjaga atau memperbaiki masalah lingkungan melalui program-program yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang ramah lingkungan, khususnya di wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk dan jumlah kendaraan yang tinggi.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan dan mengalokasikan belanja lingkungan hidup secara lebih

efektif, agar program-program yang dijalankan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan.

3. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pembangunan berkelanjutan serta pengaruh kebijakan daerah terhadap kualitas lingkungan hidup.